

V.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan
Kebijakan
Teknis
Kantor
SKIPM PKU

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan rawa indah - pekanbaru, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/ wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui peran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya di lakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor :

PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru berkomitmen dengan :

VISI:

" Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya."

MISI :

"Mewujudkan pencegahan penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mampu menjamin lalu lintas hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya".

TUJUAN :

"Lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan".

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggara-nya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru yang kompeten dan professional;
7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru;

8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru;
9. Terkelolanya anggaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru secara optimal.

Pendekatan
penyusunan
laporan
keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintergrasi Berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis
Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun KIPM Pekanbaru menerapkan basis akrual dalam Penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah Basis akuntansi yang mengakui adanya transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar Pengukuran yang diterapkan Kantor Stasiun KIPM Pekanbaru dalam penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumberdaya Ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumberdaya ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standard Akutansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akutansi merupakan prinsip – prinsip, dasar – dasar, konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akutansi.

Yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satker Stasiun KIPM Pekanbaru. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan Negara bukan pajak.

Kebijakan – kebijakan Akutansi yang penting dan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Stasiun KIPM Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Pendapatan
LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan
LO

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan – LO Adalah hak Pemerintah Pusat yang di akui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan – LO di akui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau pendapatan di realisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan – LO pada badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan jasa pelatihan di akui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - Pendapatan sewa gedung di akui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan denda di akui pada saat di keluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akutansi Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi / jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode Pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban di akui pada saat timbulnya kewajiban ; terjadinya konsumsi aset ; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban di sajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
 - Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

(a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

(b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

(c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang

Jangka

Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh

pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas Dana

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 3

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada peraturan Menteri keuangan no. 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 tentang penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
akuntansi
berbasis akrual
pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, **Kantor Stasiun KIPM Pekanbaru** telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	71.085.000	71.805.000
Pendapatan lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	71.085.000	71.805.000
Belanja		
Belanja Pegawai	4.525.632.000	4.647.393.000
Belanja Barang	3.425.667.000	3.425.667.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	140.675.000	140.675.000
Jumlah Belanja	8.091.974.000	8.213.735.000

Realisasi

Pendapatan
Negara Rp.
325.415.524

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 325.415.524 atau mencapai 457,78 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 71.085.000. Keseluruhan Pendapatan Kantor Stasiun KIPM Pekanbaru terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan lain-lain dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	-	-
2. Pendapatan Jasa	71.085.000	325.415.524	457,78
3. Pendapatan lain-lain	-	-	-
Jumlah	71.085.000	325.415.524	457,78

Realisasi Pendapatan Jasa (akun penerimaan 425289 dan 425332) per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 47,93 % dibandingkan per 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan oleh naiknya penerimaan pada akun 425289 dan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	13.330.000	-	-
2. Pendapatan Jasa	306.585.000	219.974.041	39,37
3. Pendapatan Lain-Lain	5.500.524	-	-
Jumlah Pendapatan	325.415.524	219.974.041	47,93

B.2. Belanja Negara

Realisasi
Belanja
Negara Rp.
8.128.325.554

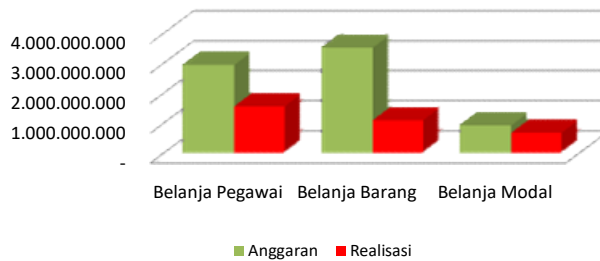
Realisasi Belanja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.8.128.325.554 atau sebesar 98,96 % dari anggarannya sebelum dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 8.213.735.000 Rincian Anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	4.647.393.000	4.578.328.717	98,51
Belanja Barang	3.425.667.000	3.409.701.437	99,53
Belanja Modal	140.675.000	140.295.400	99,73
Bantuan Sosial	-	-	0
Total Belanja Kotor	8.213.735.000	8.128.325.554	98,96
Pengembalian Belanja			0
Belanja Netto	8.213.735.000	8.128.325.554	98,96

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021



Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022, Realisasi Belanja periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,98 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya, dikarenakan naiknya belanja barang dan realisasi belanja modal pada tahun 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 Desember 2023	REALISASI PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.578.328.717	4.430.766.050	3,33
Belanja Barang	3.409.701.437	2.827.874.864	20,57
Belanja Modal	140.295.400	-	-
Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	8.128.325.554	7.258.640.914	11,98

Pegawai Rp
4.578.328.717

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.578.328.717 dan Rp. 4.430.766.050. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,33% dari 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Adanya kenaikan Tukin dari bulan agustus 2023 untuk kelas jabatan struktural dan fungsional ahli muda sebanyak 13 orang pada Tahun Anggaran 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.298.947.744	4.166.740.050	3,17
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	279.381.000	264.026.000	5,82
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	4.578.328.744	4.430.766.050	3,33
Pengembalian Belanja Pegawai	(27)		
Jumlah Belanja Bersih	4.578.328.717	4.430.766.050	3,33

Belanja
Barang Rp
3.409.701.437

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.409.701.437 dan Rp. 2.827.874.864 Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 20,57 % dari Realisasi Belanja Barang per per 31 Desember 2022. Hal ini antara lain disebabkan karena naiknya belanja barang operasional sepanjang tahun 2023.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional (5211)	1.402.736.869	1.137.077.309	23,36
Belanja Barang Non Operasional (5212)	115.173.000	85.493.500	34,72
Belanja Jasa (5221)	383.700.553	510.908.453	(24,90)
Belanja Pemeliharaan (5231)	589.870.343	463.854.282	27,17
Belanja Barang Konsumsi (5218)	239.478.756	278.958.348	(14,15)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	678.741.916	351.582.972	93,05
Jumlah Belanja Kotor	3.409.701.437	2.827.874.864	20,57
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja Bersih	3.409.701.437	2.827.874.864	20,57

Belanja
Modal Rp.
140.295.400

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 140.295.400 dan Rp. 0 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 100 % dibandingkan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain: karena adanya realisasi belanja modal pada tahun 2023 sehingga mempengaruhi naiknya realisasi belanja modal pada Tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.295.400	0	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	140.295.400	0	100,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	140.295.400	0	100,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja
Modal Tanah
Rp. 0

Realisasi Belanja Modal Tanah periode Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada belanja Modal tanah pada periode ini

Perbandingan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja
Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp.
140.295.400

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 140.295.400 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 100 % bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2022	Naik (Turun) %
Alat Angkutan Darat Bermotor			
Alat Pengolahan			
Alat Kantor			
Alat Rumah Tangga	82.295.400		100,00
Alat Studio			
Peralatan Pemancar			
Unit Alat Laboratorium			
Alat Kedokteran			
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi			
Alat Komunikasi			
Komputer Unit			
Peralatan Komputer	58.000.000		100,00
Unit Peralatan Proses/Produksi			
Jumlah Belanja Kotor	140.295.400	0	100,00
Mutasi			-
Jumlah Belanja Bersih	140.295.400	0	100,00

B.5.3. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Belanja
Modal
Gedung
dan
bangunan
Rp. 0

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada periode 31 Desember 2023 .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	-	-	-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja
Modal
jalan, irigasi
dan
jaringan
Rp.0

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada periode ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Irigasi	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Jalan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	-	-	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja
Modal
lainnya
Rp.0

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada realisasi belanja modal lainnya pada periode ini.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing- masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat Realisasi belanja bantuan sosial pada periode ini.

Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Keterangan	per 31 Desember 2023	per 31 Desember 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp.0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	per 31 Desember 2023	per 31 Desember 2022
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp 0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	per 31 Desember 2023	per 31 Desember 2022
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	-
Pajak PPh yang belum disetor	-	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan
Pajak
Rp. 0

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	per 31 Desember 2023	per 31 Desember 2022
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp 0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	per 31 Desember 2023	per 31 Desember 2022
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar
TPA
Rp .0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	per 31 Desember 2023	per 31 Desember 2022
1			-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Pendek
Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Bagian Lancar TP/TGR		0,00%	
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Bagian Lancar TPA		0,00%	
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Belanja
Dibayar
dimuka
Rp. 0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	per 31 Desember 2023	per 31 Desember 2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan
yang masih
harus diterima
Rp 0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis	per 31 Desember 2023	per 31 Desember 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp. 49.491.098

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 49.491.098 dan Rp.35.211.453

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	per 31 Desember 2023	per 31 Desember 2022
Barang Konsumsi	48.641.098	29.571.553
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang		1.087.900
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Bahan Baku	850.000	4.552.000
Jumlah	49.491.098	35.211.453

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp 0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	per 31 Desember 2023	per 31 Desember 2022
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
	Jumlah	-	-

TPA
Rp.0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	per 31 Desember 2023	per 31 Desember 2022
1			
2			
3			
4			
5		-	
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp.0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0.00%	-
Diragukan	-	0.00%	-
Macet	-	0.00%	-
Jumlah	-	0.00%	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0.00%	-
Diragukan	-	0.00%	-
Macet	-	0.00%	-
Jumlah	-	0.00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Tanah

Rp.

6.734.518.375

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM Pekanbaru per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 6.734.518.375 dan Rp. 6.734.518.375. Tidak Terdapat Kenaikan nilai aset tetap Tanah di Tahun 2023. dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	6.734.518.375
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2023	6.734.518.375

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No.	KIB	Luas	Nilai	Alamat
1	1	748	2.105.200.000	Jalan soekarno Hatta
2	2	599	215.507.000	Jalan Dermaga Purnama Dumai
3	3	1.447	411.825.000	Jalan Panglima Minal Senggono
4	4	1.230	3.411.527.000	Jalan Rawa Indah Pekanbaru
5	5	1.988	298.200.000	Jalan Grihya Tembilahan
6	6	855	292.259.375	Selat Panjang
Total		Rp	6.734.518.375	

Peralatan dan

Mesin

Rp.7.549.473.110

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.7.549.473.110 dan Rp.8.611.736.165. Terdapat mutasi kurang atas Peralatan dan Mesin Pada periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	8.611.736.165
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	1.062.263.055
Penghentian dari penggunaan	
Saldo per 31 Desember 2023	7.549.473.110
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(6.830.719.405)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	718.753.705

Gedung dan
Bangunan
Rp
5.768.099.829

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 5.768.099.829 dan Rp. 5.768.099.829 . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5.768.099.829
Mutasi tambah:	
Bangunan Gedung kantor	
Bangunan Gedung Instalasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	5.768.099.829
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1.107.326.584)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	4.660.773.245

Jalan,Irigasi
dan Jaringan
Rp.228.399.000

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.228.399.000 dan Rp.228.399.000 Tidak terdapat mutasi tambah atas Jalan, irigasi dan Jaringan Pada periode 31 Desember 2023. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	228.399.000
Mutasi tambah:	-
Penambahan jaringan tambah daya listrik	-
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2023	228.399.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(137.701.526)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	90.697.474

Aset Tetap
Lainnya
Rp.0

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 0 dan Rp.3.992.000 . Aset tetap tersebut berupa Buku-buku perpustakaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini per 31 Desember 2023.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp. 0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada TA anggaran 2023.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp.
(8.075.747.515)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(8.075.747.515) dan Rp(8.682.176.477). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	6.830.719.405	7.579.684.455	-748.965.050
2	Gedung dan Bangunan	1.107.326.584	979.259.198	128.067.386
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	137.701.526	123.232.824	14.468.702
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		8.075.747.515	8.682.176.477	-606.428.962

Aset Tak
Berwujud Rp.0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Stasiun KIPM Pekanbaru tidak mempunyai Aset Tak Berwujud pada Kantor Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah: Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp. 0.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan - penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp.0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Uang Muka
dari KPPN Rp.0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.43.536.021

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.43.536.021 dan Rp.43.023.020. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Stasiun KIPM Pekanbaru per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2023

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Uang Makan PNS	21.826.000	Bulan Desember 2023
Belanja Listrik Kantor	15.582.548	Bulan Desember 2023
Belanja Telepon Kantor	3.372.255	Bulan Desember 2023
Belanja ISP Kantor	2.755.218	Bulan Desember 2023
Total	43.536.021	

Pendapatan
yang
ditangguhkan
Rp 0

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara per tanggal 31 Desember 2023.

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Kantor Stasiun KIPM Pekanbaru per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

Uraian	Jumlah
Pendapatan PNB	-
PPH yang belum disetor	-
Total	-

Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp.0.

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan diterima di muka

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
-	-
Total	-

Beban yang
masih harus
dibayar
Rp 43.536.021

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.43.536.021 dan Rp.43.023.020 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	per 31 Desember 2023	per 31 Desember 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	21.826.000	26.277.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	21.710.021	16.746.020
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	43.536.021	43.023.020

Ekuitas

Rp.

12.210.697.876

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.210.697.876 dan Rp. 12.656.757.325. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp.

306.585.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.306.585.000 dan Rp. 205.635.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	per 31 DESEMBER 2023	per 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	306.585.000	205.635.000	49,09
Pendapatan Lain-lain	13.330.000	14.339.041	-7,04
Jumlah	319.915.000	219.974.041	45,43

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Akun 425332 Pendapatan/Jasa Sensor Karantina Ikan dan Akun 425289 Jasa Pemeriksaan Mutu Karantina Ikan per 31 Desember 2023,

sedangkan pendapatan lain lain yaitu berupa pendapatan penjualan peralatan dan mesin.

Beban

Pegawai Rp.
4.573.877.717

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.4.573.877.717 dan Rp. 4.442.358.050. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	per 31 Desember 2023	per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	2.246.831.047	2.210.913.754	1,62
Beban Tunjangan-Tunjangan	2.047.665.670	1.967.418.296	4,08
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	
Beban Lembur	279.381.000	264.026.000	5,82
Jumlah	4.573.877.717	4.442.358.050	11,52

Beban

Persediaan Rp.
189.856.608

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 189.856.608 dan Rp. 229.493.012. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	185.304.608	80.025.612	131,56
Beban Bahan Baku	4.552.000	149.467.400	-96,95
Beban Pita Cukai dan Leges	-	-	
Jumlah Beban Persediaan	189.856.608	229.493.012	34,60

Beban Barang
dan Jasa Rp.
1.906.574.423

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.906.574.423 dan Rp. 1.721.238.566. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	980.003.987	810.287.385	20,95
beban penambah Daya tahan tubuh	135.432.000	126.768.000	6,83
Beban Pengiriman surat dinas pos surat	29.789.550	26.995.300	10,35
beban Honor operasional satker	130.272.000	118.969.050	9,50
beban barang operasional lainnya	122.919.250	54.057.574	127,39
beban barang operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	-
Beban bahan	105.653.000	63.541.500	66,27
Beban Honor Output Kegiatan	0	0	-
Beban barang Non Operasional lainnya	9.520.000	18.458.000	(48,42)
beban barang Non Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	0	3.494.000	(100,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa	263.459.736	344.687.786	(23,57)
Beban Sewa	54.044.900	59.999.971	(9,93)
Beban Jasa Profesi	4.900.000	9.600.000	(48,96)
Beban Jasa lainnya	70.580.000	84.380.000	(16,35)
Beban Aset Ekstrakomtabel peralatan dan me	0	0	-
Jumlah	1.906.574.423	1.721.238.566	10,77

Beban
Pemeliharaan
Rp.625.185.621

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 625.185.621 dan Rp. 499.707.982. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	327.591.600	292.500.000	12,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	262.278.743	171.354.282	53,06
Beban persediaan untuk pemeliharaan	927.378	865.700	7,12
Beban persediaan suku cadang	34.387.900	34.988.000	(1,72)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			-
Jumlah	625.185.621	499.707.982	70,47

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.678.741.916.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.678.741.916 dan Rp.351.582.972. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	445.314.928	195.494.973	127,79
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.950.000	5.700.000	302,63
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	210.476.988	150.387.999	39,96
Jumlah	678.741.916	351.582.972	470,38

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan
Sosial Rp 0.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp.596.129.493.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.596.129.493 dan Rp.807.953.890. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	453.593.405	657.698.718	(31,03)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	128.067.386	128.067.386	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	14.468.702	22.187.786	(34,79)
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak di gunakan dalam Operasional pemerintah	-	-	-
Jumlah Penyusutan	596.129.493	807.953.890	(26,22)
			-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	596.129.493	807.953.890	(26,22)

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
TertagihRp. 0.

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Lain-lain
Rp 0.

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-lain untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus /Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional
Rp.14.838.524

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.14.838.524 dan Rp. 2.409.784. terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/Depisit pelepasan aset non lancar			
Pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	-	-
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	-	-	-
pendapatan pelepasan Aset Non Lancar	13.330.000	2.445.000	445,19
pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	5.500.524	6.657.744	(17,38)
Beban pelepasan Aset Non Lancar	3.992.000	-	100,00
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	-	6.692.960	(100,00)
pendapatan penyesuaian nilai persediaan	-	-	-
Defisit Selisih Kurs	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	14.838.524	2.409.784	515,76

Pos Luar Biasa
Rp.0.

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E . PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.12.656.757
.325.

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.12.656.757.325 dan Rp.13.156.235.718.

Defisit LO
Rp.(8.248.942
.254)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.(8.248.942.254) dan Rp.(7.844.289.688). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.0.

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Bahan Untuk Pemeliharaan	-
Pita Cukai,Materai dan Leges	-
Bahan Baku	-
Jumlah	-

KoreksiAset
Tetap Rp 0.

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

Koreksi Atas
Beban Rp 0.

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	-
Beban Jasa	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Pendapatan
Rp 0.

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	-
Pendapatan Lainnya	-
Jumlah	-

Ekuitas Akhir
Rp.12.210.69
7.876

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.12.210.697.876 dan Rp. 12.656.757.325.

F . PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- ⊙ Selama periode tahun anggaran 2023, Stasiun KIPM Pekanbaru belum ada pergantian struktur organisasi, Ade Samsudin, S.E, S.Pi, M.P – masih menjabat sebagai kepala kantor dan selaku KPA dari bulan Januari 2023 s.d sekarang.
- ⊙ Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru per 31 Desember 2023 mempunyai pembelian belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 140.295.400.
- ⊙ Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru per 31 Desember 2023 tidak mempunyai transaksi transfer masuk, dan mempunyai transfer keluar berupa Sertifikat kode CH-China senilai Rp.27.225.
- ⊙ Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru per 31 Desember 2023 mempunyai utang kepada pihak ketiga yaitu belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa pembayaran uang makan bulan desember 2023 senilai Rp.21.826.000 dan belanja barang yang masih harus dibayar berupa pembayaran Langganan Listrik, Telepon dan Internet bulan desember 2023 senilai Rp.21.710.021.